BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian terhadap Putusan No. 299/Pdt.G/2023/PA Sby dan Putusan No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks mengungkapkan adanya disparitas signifikan dalam penerapan Pasal 70 UU No. 30/1999 sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase. Pengadilan Agama Surabaya menerapkan pendekatan prosedural dengan membatasi pemeriksaan pada aspek formal proses arbitrase, yakni ketiadaan surat kuasa istimewa, penandatanganan akta perdamaian setelah pencabutan kuasa, dan pengabaian keterlibatan salah satu pihak. Pendekatan ini secara konsisten menghormati kemandirian lembaga arbitrase tanpa melakukan penilaian ulang terhadap substansi perkara. Sebaliknya, Pengadilan Negeri Bekasi mengadopsi pendekatan substantif dengan menilai kembali bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah diperiksa oleh BANI, seperti status kepemilikan tanah dan permasalahan perizinan yang seharusnya berada di luar kewenangan pemeriksaan pembatalan.

Konstruksi batasan kewenangan pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase telah diatur secara limitatif dalam kerangka hukum yang berlaku. Pasal 70 UU No. 30/1999 dengan tegas membatasi alasan pembatalan pada tiga hal spesifik yaitu dokumen palsu, dokumen yang disembunyikan, dan tipu muslihat. Batasan ini diperkuat oleh prinsip *non-intervensi* dalam UU 30/1999 pada Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2) serta larangan memeriksa alasan

atau pertimbangan putusan arbitrase dalam Pasal 62 ayat (4). Implementasi yang tepat dari batasan kewenangan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pengawasan terbatas pengadilan terhadap integritas proses arbitrase dan penghormatan terhadap finalitas putusan arbitrase sebagai karakteristik fundamental sistem arbitrase.

4.2 Saran

Mahkamah Agung perlu mengembangkan standar pemeriksaan yang seragam melalui penerbitan pedoman teknis bagi pengadilan dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pedoman tersebut harus menegaskan bahwa pemeriksaan dibatasi pada aspek formal terkait tiga alasan dalam Pasal 70 UU No. 30/1999 tanpa menilai kembali substansi putusan arbitrase. Hakim juga harus menerapkan standar pembuktian yang ketat dan interpretasi terbatas terhadap konsep "tipu muslihat" untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme pembatalan sebagai banding terselubung. Pendekatan ini akan memperkuat kepastian hukum dan mendukung perkembangan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa alternatif yang efektif.

Lembaga arbitrase perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fundamental peradilan. Verifikasi keabsahan surat kuasa, pemastian keterlibatan semua pihak dalam proses perdamaian, dan transparansi prosedur akan meminimalkan peluang pembatalan putusan oleh pengadilan. Legislator juga perlu

mempertimbangkan penyempurnaan UU No. 30/1999 dengan memberikan definisi lebih rinci tentang alasan-alasan pembatalan dan memperkuat konsekuensi hukum bagi pelampauan kewenangan pengadilan dalam memeriksa pembatalan putusan arbitrase. Kerjasama antara pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan lembaga arbitrase akan berkontribusi pada penguatan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mandiri, efisien, dan terpercaya di Indonesia.